



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 6 Juli 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Haji Pasca Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1441 H/2020 M. 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si,
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 47 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala Badan Pelaksana BPKH Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dengan didampingi Ketua Komisi VIII H.Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Haji Pasca Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/2020 M dan Isu-Isu Aktual,”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Komisi VIII DPR RI telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019 dan meminta Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk membahas usulan permintaan Ditjen PHU Kementerian Agama RI terkait BPIH sebesar Rp176.5 miliar (Haji Reguler) dan Rp612.8 juta (Haji Khusus).
3. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat kembali secepatnya sebelum reses dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH mengenai usulan:
 - a. Penggunaan Nilai Manfaat Keuangan Haji BPKH tahun 2020, termasuk akumulasi dan efisiensi biaya operasional BPIH, untuk dukungan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun-tahun berikutnya.
 - b. Penambahan alokasi pembagian untuk Rekening Virtual (*Virtual Account*) menjadi sebesar Rp2 triliun atau 28% dari nilai manfaat BPKH tahun berjalan kepada jemaah tunggu.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.13 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**


H. MARWAN DASOPANG, M.Si,